

LAPAS KELAS IIB
TANJUNGPANDAN

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP

LKjIP 2022



PASTI

- ▶ Profesional
- ▶ Akuntabel
- ▶ Sinergi
- ▶ Transparan
- ▶ Inovatif



DAFTAR ISI

	halaman
BAB I Pendahuluan	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Aspek Strategis	8
E. Isu Strategis	15
F. Sistematika Laporan	15
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	17
A. Rencana Strategis	17
B. Perjanjian Kinerja	18
BAB III Akuntabilitas Kinerja	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	39
C. Capaian Kinerja Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46

LAMPIRAN

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SURVEI IKM DESEMBER 2022

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel I : Sasaran Program/Kegiatan Kinerja.....	11
Tabel II : Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	20
Tabel III : Capaian Kinerja Tahun 2022.....	24
Tabel IV : Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	39
Tabel V : Capaian Kinerja Tahun 2021.....	54

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2022.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Penyusunan laporan kinerja didasari pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan pada perjanjian kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi dan penghargaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan.

Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2022.

Semoga LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dapat bermanfaat guna peningkatan kualitas kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semakin PASTI BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

Kepala

Mahendra Sulaksana, A.Md.I.P.,S.H.,M.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dalam pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dijabarkan dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan Sasaran Program Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran program dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM 2020 – 2024.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Hukum dan HAM atas kinerja yang telah dan dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan yang sesuai dalam penggunaan anggaran tahun 2020.

Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang harus selalu memastikan penerapan aspek – aspek perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) dilaksanakan secara Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif sesuai dengan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM yaitu “PASTI”.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. yang dimaksud dengan Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan adalah Lembaga atau tempat Warga Binaan menjalani masa pidananya. LAPAS merupakan Unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Masyarakat. Lapas dipimpin oleh seorang Kepala Lapas.

Bahwa setiap yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental dan spiritual. Dengan demikian untuk menjamin perlindungan terhadap Warga binaan yang berhadapan dengan hukum (ABH) secara terpadu diperlukan suatu lembaga yang mengakomodir kebutuhan itu semua, khususnya di wilayah kerja kepulauan bangka belitung.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga atau tempat Warga Binaan menjalani masa pidananya. Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Lapas dipimpin oleh seorang Kepala Lapas.

1. Tugas

Lapas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Fungsi

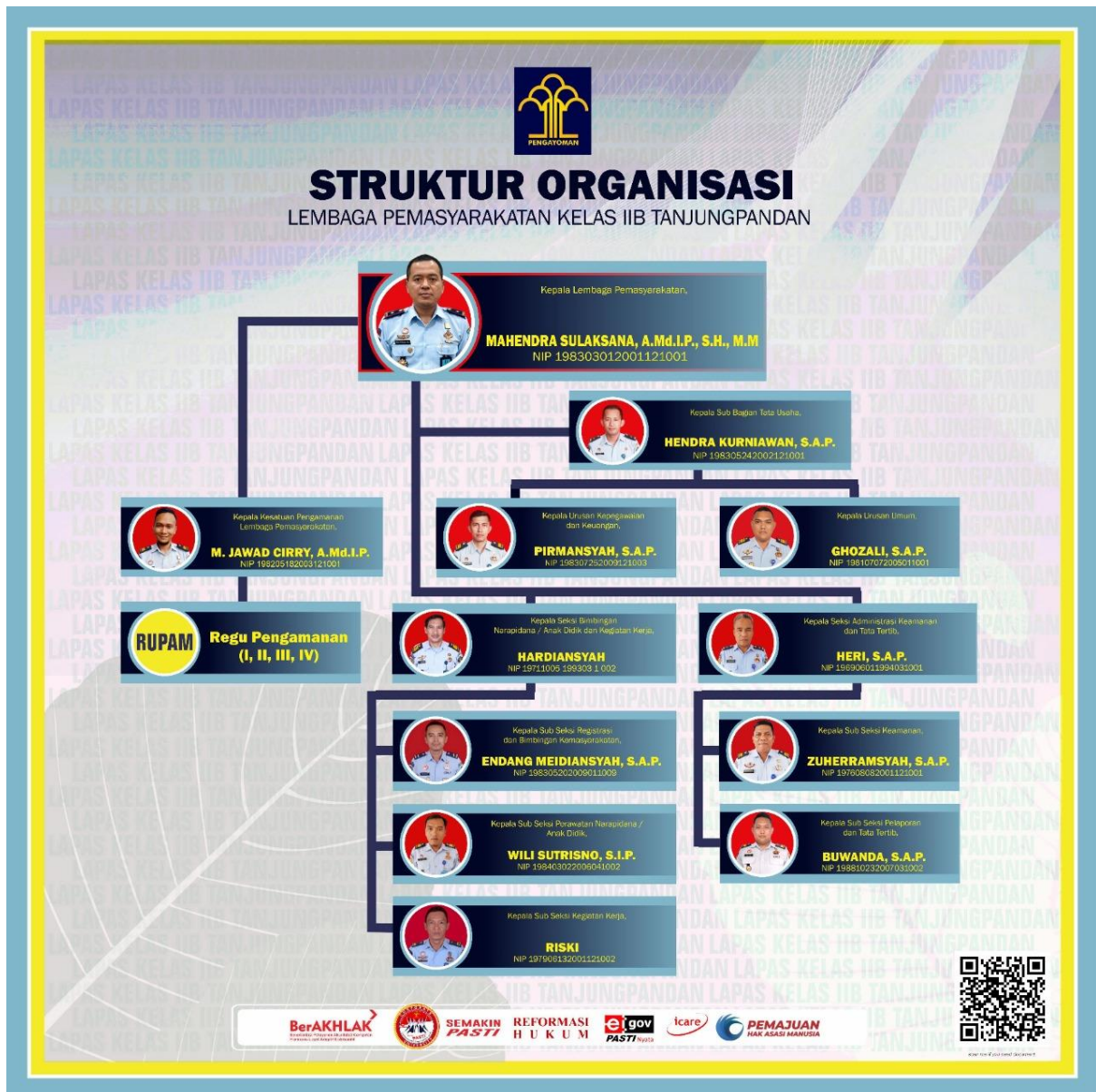
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Lapas menyelenggarakan fungsi :

- Sub Bagian Tata Usaha
Melakukan Urusan Kepegawaian , Keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
- Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja
Melakukan Registrasi, Statistik dan dokumentasi sidik jari Narapidana, memberikan bimbingan Pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan perawatan Narapidana / Anak Didik, memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan Fasilitas sarana kerja serta mengelola hasil kerja.
- Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
Mengatur jadwal penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan yang bertugas.
- Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana, melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Letak Geografis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan terletak di Jalan Pengayoman, Desa Cerucuk, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung.

Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Tanjungpandan



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Lapas Kelas IIB Tanjungpandan didukung oleh sumber daya manusia berjumlah 65 Orang dengan Klasifikasi sebagai berikut :

- Klasifikasi Pegawai berdasarkan jenis kelamin :
 - Pegawai Pria : 62 Orang (CPNS 17 Orang)
 - Pegawai Wanita : 03 Orang
- Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan :
 - Golongan I : -
 - Golongan II : 42 Orang
 - Golongan III : 23 Orang
 - Golongan IV : - Orang

- Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan :
- SD : -
- SMP : -
- SMA/SMK : 50 Orang
- D III : 01 Orang
- S 1 : 13 Orang
- S 2 : 01 Orang

C. Maksud dan Tujuan

Adapun penjabaran visi dan misi diatas disesuaikan dengan kedudukan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan sebagai berikut :

- a. Membentuk Warga Binaan menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kecenderungan hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus bangsa;
- b. Mewujudkan keseimbangan, kemajuan Warga Binaan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang berperan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memulihkan kualitas hubungan Warga binaan dengan keluarga dan masyarakat melalui upaya reintegrasi sosial;
- d. Mewujudkan kepentingan terbaik bagi Warga Binaan, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat Warga binaan;
- e. Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang Warga binaan;
- f. Meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan Warga binaan agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggungjawab;
- g. Menjadikan lembaga yang layak dan ramah , serta mempersiapkan Warga Binaan agar mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan setelah kembali lagi ke masyarakat.

D. Aspek Strategis

Dari beberapa Tujuan yang hendak dicapai, ditentukanlah Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang pengukurannya menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact*.

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2020-2024, antara lain :

- 1) Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- 3) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- 4) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Untuk mempermudah dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan) yang Prima	Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
2	Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan.	Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
3	Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT

Dokumen Rencana Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Rencana Kerja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program. Rencana dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun neraca, prakiraan sasaran tahun berikutnya, alokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran serta cara pelaksanaannya.

Renja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan yang selanjutnya ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. Adapun indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Perencanaan Penganggaran / Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2021.

Pada Tahun 2022 dalam RKA K/L Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan mengemban Program “Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah” dengan anggaran sebesar **Rp. 2.122.385.000** (*dua miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan dengan anggaran sebesar Rp. **12.646.971.000** (*dua belas miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)“.

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.122.385.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 12.646.971.000
Total	Rp. 14.769.356.000

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN KINERJA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
SS 3 : Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan, Pengendalian Penyakit yang menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana sesuai standar	75 %	1.061.192.500
						2	Persentase Tahanan/Narapidana layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93 %	
						3	Persentase Tahanan/Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96 %	
						4	Persentase Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70 %	
						5	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80 %	
						6	Persentase Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80 %	
						7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70 %	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
						8	Persentase perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahgunaan /korban penyalahgunaan narkoba	25 %	
SS 4 : Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesioanal dalam mendukung penegakan hukum yang berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, Anak dan klien Pemasarakatan ,	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah					530.596.250
					Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100 %	
						2	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	100 %	
						3	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	100 %	
					Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	1	Persentase Warga binaan yang memperoleh nilai baik dengan presikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	100 %	
						2	Persentase Warga binaan yang mendapatkan Remisi		
					Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan Warga binaan di Lapas dan pengentasan Anak di wilayah sesuai Standar	1	Persentase Warga binaan yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat	75 %	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
						2	Persentase Warga binaan yang memperoleh Hak Integrasi	100 %	
						3	Persentase Warga binaan yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80 %	
						4	Persentase Warga binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80 %	
SS 5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang aman dan tertib	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 %	
						2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70 %	
						3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana pelaku gangguan kamtib	80 %	
						4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70 %	
SS 8: Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Program Dukungan Manajemen			Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Pemasyarakatan	Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker	1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	12.646.971.000
						2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
						3	Tersedianya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasyarakatan	1 Layanan	
						4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
						5	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
						6	Jumlah kendaraan bermotor	1 Layanan	
						7	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Layanan	
						8	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Layanan	
						9	Jumlah gedung dan bangunan	1 Layanan	

Tabel IV. Sasaran Program/Kegiatan Kinerja

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, yaitu :

1. Belum selarasnya indikator/ukuran keberhasilan dalam Renstra Kementerian/Lembaga dengan indikator kinerja Sekretariat Jendral agar memenuhi kriteria *Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Timebond* (SMART) dan Cukup;
2. Dalam penyusunan perencanaan tahun yang akan datang, terdapat kebijakan dan prioritas baru yang berbeda dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Sehingga hasil evaluasi belum dapat direalisasikan sepenuhnya dalam penyusunan perencanaan tahun mendatang;
3. Kebutuhan BMN yang belum memenuhi standar kebutuhan;
4. Terdapat BMN yang dalam kondisi rusak berat yang belum dilakukan penghapusan;
5. Belum adanya aturan yang baku terkait pengelolaan kehumasan yang terpadu;
6. Penetapan standarisasi layanan keprotokolan dan pengamanan guna keseragaman pelaksanaan dan kejelasan tugas fungsi setiap petugas protokol di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan;
7. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan belum mempunyai Ruang Sentral Arsip;
8. Ketersediaan lokasi untuk kegiatan keterampilan dan rekreasi Warga Binaan yang kurang/belum memadai.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2022 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2022.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2022, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV

PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2022 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

a. Visi, Misi dan Tujuan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJM Nasional). Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024. Pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan adalah untuk mencapai Visi Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

b. Misi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan sebagai supporting unit bagi Kementerian Hukum dan Ham bertanggungjawab mensukseskan misi Kementerian Hukum dan Ham tersebut. Hal tersebut diterjemahkan ke dalam Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas. Bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM (Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan) yang Prima.
2. Mendukung penegakan hukum di bidang Masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya. Bertujuan untuk memenuhi hak-hak warga binaan masyarakat serta membentuk Warga Binaan Masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan.
3. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Masyarakat. Bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

B. Perjanjian Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dengan Perjanjian Kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RKA-KL yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target kinerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik (*specific*);
2. Dapat terukur (*measurable*);
3. Dapat tercapai (*attainable*);
4. Berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja, dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut diuraikan target kinerja

Tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

Adapun Target Kinerja masing – masing kegiatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandantahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	1.061.192.500
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	
		6. Persentase tahanan/narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	25%	
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	1. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	530.596.250
		2. Persentase Warga binaan yang memperoleh hak remisi	98%	
		3. persentase Warga binaan yang memperoleh Hak Integrasi	80%	
		4. Persentase Warga binaan yang mendapatkan hak pendidikan	80%	
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	
		6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	
		7. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67%	
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	530.596.250
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	12.646.971.000
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.122.385.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp2.122.385.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 12.646.971.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 12.646.971.000

Tabel II. Perjanjian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana jika dilakukan dengan kegiatan secara berkesinambungan dan sinergis dengan Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM “PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan *core value* ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) yaitu :

1. Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;
3. Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM;
4. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja;
5. Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM.
6. Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja menurut realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L), Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp 14.769.356.000,-** (*empat belas miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*) untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2022 dan dilakukan pengukuran atau evaluasi secara berkala dalam aplikasi *E-performance*.

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2022
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PANGKAL PINANG

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCAADING			TARGET			REALISASI	LAMPIRAN	CATATAN MONITORING	BOBO
					KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)				
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Tahanan/Tahanan/Anak/Pengasahan Pempok Melalui dan Peningkatan Kualitas Hidup Tahanan/Anak Peserta Rehabilitasi di wilayah		1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/tahanan/Anak yang dapat diakses 			75 persen Triwulan IV	TW1	0	300	Januari - Persentase jumlah Tahanan/tahanan/Anak yang mendapatkan pelayanan makanan sesuai standar dibagi jumlah Tahanan/tahanan/Anak dikali 100% = 15/15x 100% = 100 % Februari - Persentase jumlah Tahanan/tahanan/Anak yang mendapatkan pelayanan makanan sesuai standar dibagi jumlah Tahanan/tahanan/Anak dikali 100% = 17/17x 100% = 100 % Maret - Persentase jumlah Tahanan/tahanan/Anak yang mendapatkan pelayanan makanan sesuai standar dibagi jumlah Tahanan/tahanan/Anak dikali 100% = 21/21x 100% = 100 % April - Persentase jumlah Tahanan/tahanan/Anak yang mendapatkan pelayanan makanan sesuai standar dibagi jumlah Tahanan/tahanan/Anak dikali 100% = 19/19x 100% = 100 % Mei - Persentase jumlah Tahanan/tahanan/Anak yang mendapatkan pelayanan makanan sesuai standar dibagi jumlah Tahanan/tahanan/Anak dikali 100% = 18/18x 100% = 100 % Juni - Persentase jumlah Tahanan/tahanan/Anak yang mendapatkan pelayanan makanan sesuai standar dibagi jumlah Tahanan/tahanan/Anak dikali 100% = 21/21x 100% = 100 % Juli - Agustus - September - Oktober - November - Desember -			0
								TW2	0	300				
								TW3	0	0				
								TW4	75	persen				
			2	Persentase Tahanan/tahanan/Anak mendapatkan layanan kesehatan (gawat) secara berkala 			85 persen Triwulan IV	TW1	0	300	Januari - Persentase jumlah Tahanan/tahanan/Anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan preventif secara berkala dan berkualitas dibagi jumlah Tahanan/tahanan/Anak dikali 100% = 10/10x 100% = 100 % Februari - Persentase jumlah Tahanan/tahanan/Anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan preventif secara berkala dan berkualitas dibagi jumlah Tahanan/tahanan/Anak dikali 100% = 17/17x 100% = 100 % Maret - Persentase jumlah Tahanan/tahanan/Anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan preventif secara berkala dan berkualitas dibagi jumlah Tahanan/tahanan/Anak dikali 100% = 21/21x 100% = 100 % April - Persentase jumlah Tahanan/tahanan/Anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan preventif secara berkala dan berkualitas dibagi jumlah Tahanan/tahanan/Anak dikali 100% = 19/19x 100% = 100 %			0
								TW2	0	300				

Pencapaian Sasaran Program Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam RKA K/L Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

➤ **TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	1.061.192.500
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	
		6. Persentase tahanan/narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	1. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	530.596.250
		2. Persentase Warga binaan yang memperoleh hak remisi	98%	
		3. persentase Warga binaan yang memperoleh Hak Integrasi	80%	
		4. Persentase Warga binaan yang mendapatkan hak pendidikan	80%	
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	
		6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67%	
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	530.596.250
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	12.646.971.000
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	

Tabel III. Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas, dari semua Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang Capaian Kinerjanya pada Tahun 2022 mencapai maupun melewati dari target yang telah ditetapkan, pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang mencapai target lainnya. Sedangkan terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama capaian 0%, hal ini dikarenakan pada indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan/direalisasikan di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan pada tahun 2022.

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah

1. Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar
- Target 2022 : 75%
- Capaian : 100%
- Realiasi : 988.596.500
- Keterangan : Persentase jumlahTahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan pelayanan makanan sesuai standart **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak **dikali** 100% = $2354/2354 \times 100 \% = 100 \%$
2. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
- Target 2022 : 93%
- Capaian : 100%
- Realiasi : 72.596.000
- Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan preventif secara berkala dan berkualitas **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak **dikali** 100% = $395/2354 \times 100 \% = 16 \%$
3. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
- Target 2022 : 96%
- Capaian : 0%
- Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak perempuan (ibu hamil dan menyusui) **dikali** 100% = $0/ 0 \times 100 \% = 0 \%$
4. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- Target 2022 : 70%
- Capaian : 0%

- Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental **dikali** $100\% = 1/1 \times 100\% = 100\%$
5. Indikator Kinerja : Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- Target 2022 : 80%
- Capaian : 0%
- Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang lansia **dikali** $100\% = 6/6 \times 100\% = 0\%$
6. Indikator Kinerja : Persentase tahanan/narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- Target 2022 : 80%
- Capaian : 0%
- Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$
7. Indikator Kinerja : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
- Target 2022 : 70%
- Capaian : 0%
- Keterangan : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang menderita penyakit HIV-AIDS dan TB Positif **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$
8. Indikator Kinerja : Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
- Target 2022 : 25%
- Capaian : 0%

Keterangan : Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengikuti program Rehabilitasi Narkoba **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$ **Keterangan** : di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan tidak ada program rehabilitasi bagi Warga Binaan pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Binaan di Lapas dan Pengentasan Warga di wilayah sesuai standar

1. Indikator Kinerja : Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
 Target 2022 : 65%
 Capaian : 100%
 Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak selama tahun 2022 dikali $100\% = 135/135 \times 100\% = 100\%$.
2. Indikator Kinerja : Persentase Warga binaan yang memperoleh hak remisi
 Target 2022 : 100%
 Capaian : 100%
 Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang memperoleh hak remisi dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang akan memperoleh hak integrasi dikali $100\% = 228/228 \times 100\% = 100\%$.
3. Indikator Kinerja : persentase Warga binaan yang memperoleh Hak Integrasi
 Target 2022 : 80%
 Capaian : 100%
 Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang akan memperoleh Hak pengasuhan sesuai standar dikali $100\% = 161/161 \times 100\% = 100\%$. Keterangan :Tahanan yang masih berada di kepolisian tidak menerima hak pengasuhan

4. Indikator Kinerja : Persentase Warga binaan yang mendapatkan hak pendidikan
 Target 2022 : 80%
 Capaian : 0%
 Keterangan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan hak pendidikan dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang akan memperoleh pendidikan formal dan non formal dikali $100\% = 0/0 \times 0\% = 88\%$. Keterangan : Tahanan yang masih berada di kepolisian tidak mengikuti pendidikan formal dan non formal
5. Indikator Kinerja : Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin
 Target 2022 : 15%
 Capaian : 100%
 Keterangan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang akan memperoleh pendidikan formal dan non formal dikali $100\% = 135/135 \times 100\% = 100\%$. Keterangan : Tahanan yang masih berada di kepolisian tidak mengikuti pendidikan formal dan non formal
6. Indikator Kinerja : Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
 Target 2022 : 28%
 Capaian : 0%
 Keterangan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang akan memperoleh pendidikan formal dan non formal dikali $100\% = 0/2354 \times 100\% = 0\%$. Keterangan : Tahanan yang masih berada di kepolisian tidak mengikuti pendidikan formal dan non formal
7. Indikator Kinerja : Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif
 Target 2022 : 67%
 Capaian : 0%
 Keterangan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang bekerja dan produktif dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang akan memperoleh pendidikan formal dan non formal dikali $100\% = 0/2354 \times 100\% = 0\%$. Keterangan : Tahanan yang masih berada di kepolisian tidak mengikuti pendidikan formal dan non formal

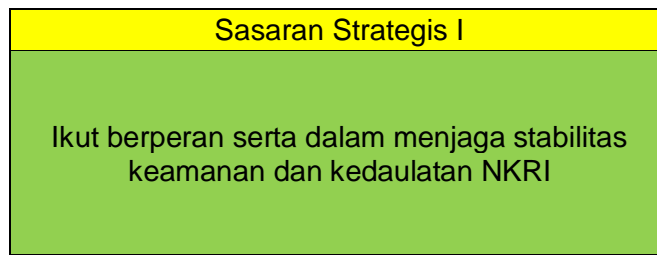
3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

1. Indikator Kinerja : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
Target 2022 : 80%
Capaian : 100%
Keterangan : Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%, Ket : $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$.
2. Indikator Kinerja : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
Target 2022 : 70%
Capaian : 0%
Keterangan : Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi dikali 100%. Ket : $0 \times 100\% = 0\%$
3. Indikator Kinerja : Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
Target 2022 : 80%
Capaian : 0%
Keterangan : Jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran dibagi jumlah pelaku gangguan kamtib dikali 100% - Ket : $0 \times 100\% = 0\%$
4. Indikator Kinerja : Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
Target 2022 : 70%
Capaian : 0%
Keterangan : Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100%, Ket : $0 \times 100\% = 100\%$

4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

1. Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
Target 2022 : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan

- Keterangan : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu
2. Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
Target 2022 : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan
Keterangan : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
3. Indikator Kinerja : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat
Target 2022 : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan
Keterangan : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat
4. Indikator Kinerja : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
Target 2022 : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan
Keterangan : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
5. Indikator Kinerja : Jumlah Layanan Perkantoran
Target 2022 : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan
Keterangan : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat



Sasaran Strategis ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasaryakatan dengan target 75%.



• **Indikator Kinerja Utama 1 “Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasaryakatan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasaryakatan merupakan Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Sasaran Strategis 1 Lapas Kelas IIB Tanjungpandan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasaryakatan	75%	100%	133,3%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasaryakatan belum memiliki perbandingan dikarenakan baru ditetapkan pada Tahun 2022.

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator	2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75%	100%	133,3%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 85%. Realisasi di TA 2021 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 100%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75%	75%	80%	85%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

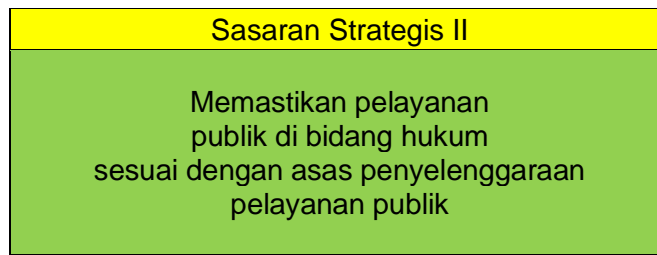
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

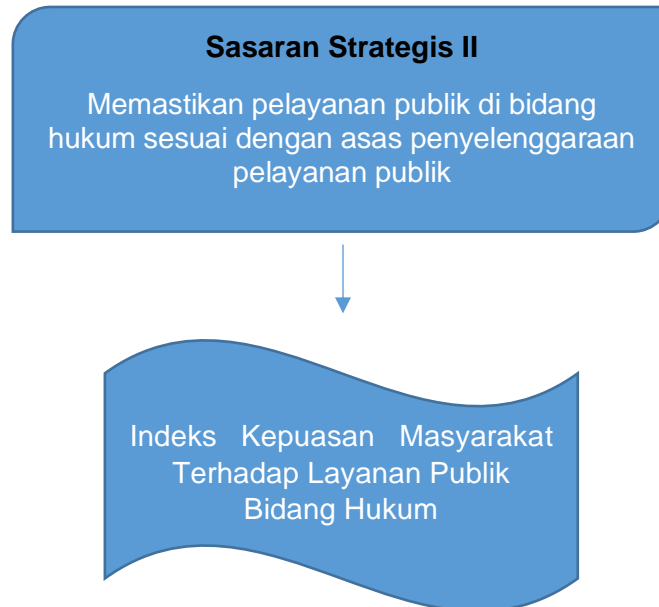
- Sarana Prasarana yang sangat memadai
- SDM yang mempunyai softskill dibidangnya

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dilakukan melalui tahapan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap kegiatan.



Sasaran Strategis ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum dengan target 77,5%.



Indikator Kinerja Utama 2 “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum belum memiliki perbandingan dikarenakan baru ditetapkan pada Tahun 2022.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum belum memiliki perbandingan dikarenakan baru ditetapkan pada Tahun 2022.

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator	2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	77,5%	97,54%	125,85%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 82,5%. Realisasi di TA 2021 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 97,54%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	75%	77,5%	80%	82,5%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum hanya dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Tanjungpandan.

5. Penyebab Keberhasilan

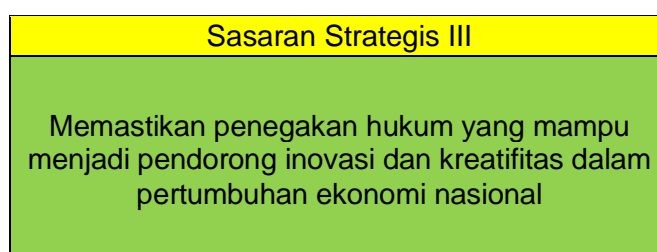
- Strategi yang baik dalam penyampaian kepada masyarakat
- Inovasi terbitan Lapas Tanjungpandan yang mempermudah tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

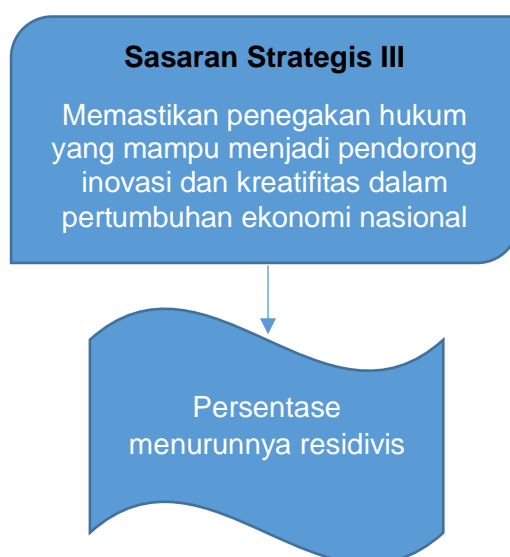
Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dilakukan melalui tahapan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap kegiatan.

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator	2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5%	97,54%	125,85%



Sasaran Strategis ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase menurunnya residivis.



- **Indikator Kinerja Utama 3 “Persentase menurunnya residivis”**

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Persentase menurunnya residivis belum memiliki perbandingan dikarenakan baru ditetapkan pada Tahun 2022.

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator	2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya residivis	1%	1%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Persentase menurunnya residivis belum memiliki perbandingan dikarenakan baru ditetapkan pada Tahun 2022.

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator	2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya residivis	1%	1%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase menurunnya residivis	0,5	1%	1%	1,5%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Sasaran Strategis 3 terdapat Persentase menurunnya residivis yang dapat dilakukan perbandingan dengan data internasional. Berikut perbandingan tren penurunan/ kenaikan tingkat residivis antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia.

TAHUN	WBP BEBAS	WBP MASUK KEMBALI	PERSENTASE
2016	118.248	16,895	14.29%
2017	125.963	19,813	15.73%
2018	136.068	21.224	15.60%
2019	141.662	22.132	15.62%
2020	143.303	23.382	16.32%
2021	120.043	18.467	15.38%
2022	140.843	20.065	14.25%

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Tahun 2022

TAHUN	NARAPIDANA BEBAS	NARAPIDANA MASUK KEMBALI	PERSENTASE
2016	110.683	9.875	8,92%
2017	124.567	11.520	9,25%
2018	134.690	13.896	10,32%
2019	143.636	15.410	10,88%

(Sumber; Departemen Penjara Malaysia, 2021 dalam jurnal *Pertanika Journal* dengan judul "Desistance and Recidivism Among Former Prisoners in Malaysia: A Proposed Model According to the Age-Graded Theory")

tingkat residivis negara Malaysia cenderung mengalami tren kenaikan sedangkan pada Negara Indonesia mengalami tren penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem Pemasyarakatan mampu memperbaiki hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Mantan Narapidana agar dapat tidak mengulangi tindak pidana dan berperan aktif dalam pembangunan nasional berguna bagi bangsa dan negara.

5. Penyebab Keberhasilan

Program penyelenggaraan pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan optimal. Salah satu program unggulan pemasyarakatan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yaitu 3 Kunci Pemasyarakatan Maju + 1 Back to basic yaitu :

- a) Deteksi Dini Gangguan Keamanan Dan Ketertiban

b) Berantas Narkoba

c) Sinergi Dengan Aparat Penegak Hukum

+ 1 Back To Basic adalah Program pelaksanaan prinsip dasar Pemasyarakatan dengan cara peningkatan kualitas layanan berdasarkan prinsip dasar Pemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

memberikan keterampilan dan atau pekerjaan bagi klien pemasyarakatan agar bisa hidup mandiri, diterima masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya atau melakukan tindak pidana yang lain.

B. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB TanjungpandanKepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 (Desember 2022) diuraikan sebagai berikut :

KODE	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	REALISASI %
1	2	3	4	5	6
5252.BDC .002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integritas Narapidana	144.902.000	133.646.000	11.256.000	92,23%
051	Pembinaan Kepribadian	108.902.000	97.648.500	11.253.500	89,67%
052	Layanan Integritas dan TPP	36.000.000	35.997.500	2.500	99,99%
5252.BDC .004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	1.646.725.000	1.646.114.507	610.493	99,96%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1.646.725.000	1.646.114.507	610.493	99,96%

5252.BDC .S01	Pembinaan Kemandirian Narapidana	76.600.000	76.332.500	267.500	99,65%
051	Perencanaan	1.450.000	1.430.000	20.000	98,62%
052	Pelaksanaan	72.430.000	72.182.500	247.500	99,66%
053	Evaluasi dan Pelaporan	2.720.000	2.720.000	-	100,00%
5252.BHB .002	Layanan Keamanan dan Ketertibn	40.491.000	37.998.500	2.492.500	93,84%
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	17.562.000	17.530.000	32.000	99,82%
052	Pengawasan	22.929.000	20.468.500	2.460.500	89,27%
6231.EBA .956	Layanan BMN	22.590.000	22.321.800	268.200	98,81%
051	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	11.010.000	10.741.800	268.200	97,56%
052	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	11.580.000	11.580.000	-	100,00%
6231.EBA .958	Layanan Hubungan Masyarakat	4.500.000	4.500.000	-	100,00%
051	Penyediaan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-	100,00%
052	Kerja Sama	1.500.000	1.500.000	-	100,00%
6231.EBA .962	Layanan Umum	28.852.000	24.739.722	4.112.278	85,75%

051	Urusan Umum	22.200.000	18.138.162	4.061.838	81,70%
052	Fasilitasi Kerja New Normal	6.652.000	6.601.560	50.440	99,24%
6231.EBA .994	Layanan Perkantoran	4.501.971.000	4.492.739.897	9.231.103	99,79%
001	Gaji dan Tunjangan	3.442.991.000	3.440.710.706	2.280.294	99,93%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.058.980.000	1.052.029.191	6.950.809	99,34%
6231.EBB .951	Program Sarana Internal	92.000.000	91.256.000	744.000	99,19%
051	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	68.000.000	67.656.000	344.000	99,49%
053	Peralatan Fasilitas Perkantoran	24.000.000	23.600.000	400.000	98,33%
6231.EBB .971	Layanan Prasarana Internal	8.375.000.000	8.307.501.500	67.498.500	99,19%
051	Gedung dan Bangunan	8.375.000.000	8.307.501.500	67.498.500	99,19%
6231.EBC .954	Layanan Manajemen SDM	17.268.000	17.246.000	22.000	99,87%
051	Pembinaan Kepegawaian	17.268.000	17.246.000	22.000	99,87%
6231.EBD .952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	23.590.000	23.577.800	12.200	99,95%
051	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	23.590.000	3.291.100	378.900	89,68%
6231.EBD .953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.670.000	10.971.500	38.500	99,65%
051	Penyusunan Laporan Kinerja	3.670.000	10.971.500	38.500	99,65%

6231.EBD .955	Layanan Manajemen Keuangan	11.010.000	10.971.500	38.500	99,65%
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	11.010.000	10.971.500	38.500	99,65%
6231.EBD .961	Layanan Reformasi Kinerja	23.520.000	23.298.200	221.800	99,06%
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	23.520.000	23.298.200	221.800	99,06%
JUMLAH		15.012.689.000	14.921.065.026	91.623.974	99,39%

Tabel IV. Realisasi Anggaran Tahun 2022

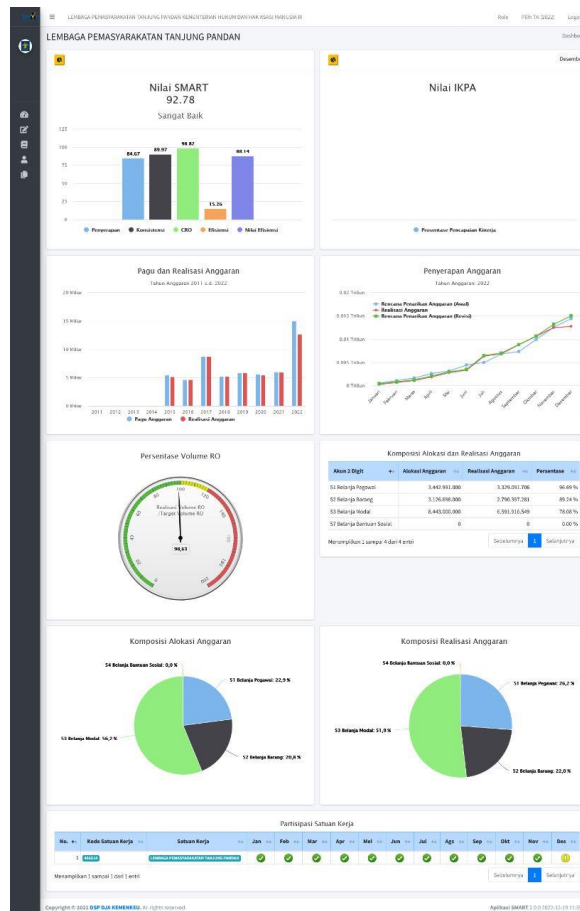
Realisasi Anggaran Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan yang dapat terserap dengan maksimal per Desember 2022 pada Tahun Anggaran 2022 dari Pagu Rupiah Murni : **Rp 15,012,689,000,-** Realisasi : **Rp 14,921,065,026,-** Persentase Realisasi **99,39%**. Adapun perbandingan realisasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
TAHUN 2021				
Belanja Pegawai	3,005,636,000	2,972,584,423	33,051,577	(98.90%)
Belanja Barang	3,012,522,000	2,986,234,197	26,287,803	(99.13%)
Belanja Modal	-	-	-	(0%)
Total	6,018,158,000	5,958,818,620	59,339,380	(99.01%)
TAHUN 2022				
Belanja Pegawai	3,442,991,000	3,440,460,962	2,530,038	(99.93%)
Belanja Barang	3,126,698,000	3,099,640,920	27,057,080	(99.13%)
Belanja Modal	8,443,000,000	8,434,614,500	8,385,500	(99.90%)
Total	15,012,689,000	14,974,716,382	37,972,618	(99.75%)

C. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Kementerian Keuangan RI guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan Kualitas/mutu pelaporan data kinerja anggaran yang update/sesuai dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan.

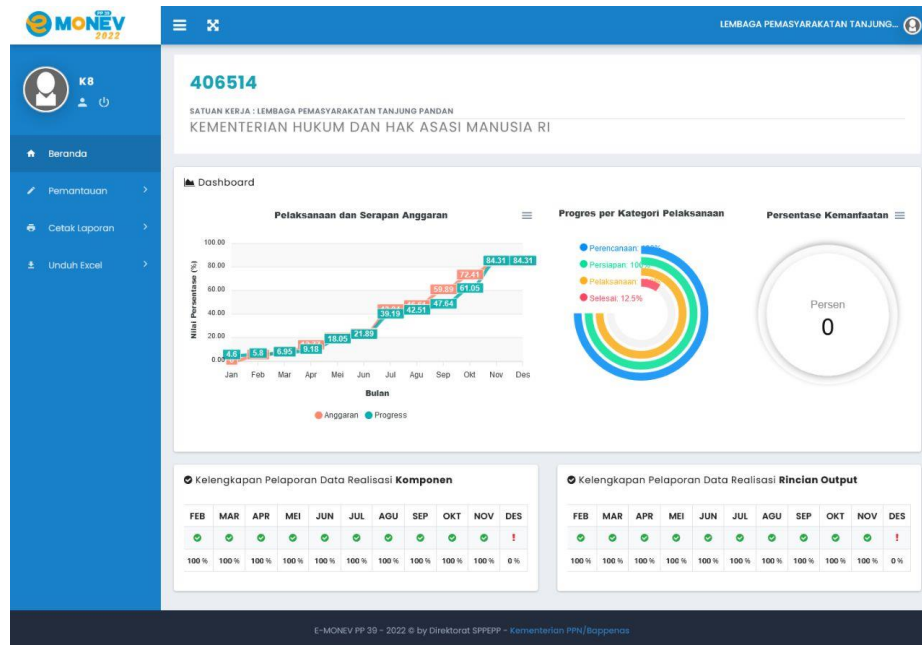


2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Penilaian IKPA tahun anggaran 2022 berubah dari 13 indikator menjadi 8 indikator, meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Sehingga Penilaian IKPA tahun anggaran 2022 mendapatkan Total sisa Rp 37.972.618,- dengan persentase 99,75%.

2) E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev Bappenas merupakan salah satu instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan satker kementerian/lembaga.



3) Kegiatan Prioritas Nasional

Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan sejauh ini belum melaksanakan kegiatan skala prioritas nasional dikarenakan kegiatan prioritas nasional hanya dilaksanakan pada tingkat kantor wilayah dan kementerian.

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja Tahun 2022 merupakan wujud sinergi seluruh jajaran di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dalam menghadapi berbagai tantangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholders dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM di tahun yang akan datang.

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program yang dilaksanakan;
2. Pada tahun 2022, target dalam Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sudah tercapai dengan baik meskipun masih terdapat target yang belum tercapai serta terdapat capaian lainnya;
3. Anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp 15,012,689,000,-** Realisasi : **Rp 14,974,756,382,-** Persentase Realisasi **99.75%**;
4. Dalam pelaksanaan kegiatan telah menerapkan prinsip akuntabel, efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya.

B. Saran

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan. Berikut beberapa saran untuk meningkatkan kinerja instansi kedepannya:

1. Memanfaatkan data yang disajikan dalam laporan kinerja dan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan, maupun dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, perbaikan pengelolaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja, Kementerian Keuangan dan mitra kerja lainnya terkait Pelaksanaan Anggaran;
3. Meningkatkan koordinasi antara Humas Unit Pusat dan Kantor Wilayah dalam penguatan Kehumasan serta Humas Kementerian/Lembaga dalam penyebaran informasi;

4. Perlu pelatihan khusus atau diklat terutama masalah tatacara pelaporan (LKjIP, Lapbul, SPIP, Laporan Tahunan);
5. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah rangka melaksAnakan kegiatan operasional kantor;
6. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait;
7. Menguatkan fungsi pengawasan internal pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB tanjungpandan;
8. Beberapa target dari sasaran yang ditetapkan masih perlu di optimalkan lagi mengenai kegiatan dan penganggarannya.

Belitung, 30 Maret 2023

Kepala,



Wahendra Sulaksana

NIP 198303012001121001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Romiwin Hutasoit
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anas Saeful Anwar
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Tanjungpandan

Romiwin Hutasoit
NIP. 196706201992031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90

3.	Terwujudnya	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT	75
----	-------------	------------------------------------	----

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Pemasyarakatan	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	75% 93% 96% 70% 80% 80% 70% 25%

2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan	28%

		vokasi bersertifikasi	
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan

	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
--	-------------------------------	-----------

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.122.385.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.122.385.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 12.646.971.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 12.646.971.000

Pangkalpinang, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bangka Belitung


Ana Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIB Tanjungpandan


Romwin Hulasoit
NIP. 196706201992031001

SURVEI IKM BULAN DESEMBER 2022

SURVEI BALITBANGHAM PADA SATKER KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DESEMBER 2022

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
TANJUNGPANDAN**

I. KUALITAS PELAYANAN
(IKM)

17.08/17.50

(97.60/100) (3.90/4)

II. PERILAKU PENYIMPANGAN
PELAYANAN
(IPK)

17.06/17.50

(97.48/100) (3.90/4)

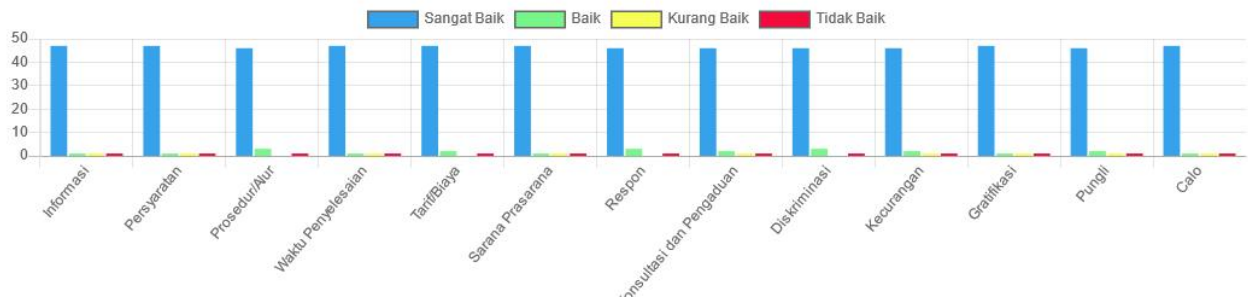


Responden

50

Sangat Baik |
 Baik |
 Kurang Baik |
 Tidak Baik

IKM/ IPK



LAMPIRAN TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%
		Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%

		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100


KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.829.810.000,-
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.318.897.000,-
Total	Rp. 6.148.707.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan
Bangka Belitung



Agus Saeful Anwar
NIP. 19620219 198603 1 002

Belitung, 13 Januari 2021
Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas
Kelas IIB Tanjungpandan



Romiwin Hutasoit
NIP. 19670620 199203 1 001

Tabel V. Capaian Kinerja Tahun 2021